



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG**

Renja

(Rencana Kerja)

20
24

(0548) 21301, 21152 @bapendakotabontang bapenda.bontangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan petunjukNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kota Bontang.

Bontang, Juli 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



RAFIDAH, SE, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19700323 200112 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isiii

Daftar Tabeliv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika dan Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 20

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 23

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang..... 25

2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah..... 26

2.3.3 Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Pada Tahun yang Direncanakan 27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 36

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2024 38**

BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah sd Tahun 2023 Kota Bontang13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 202321

Tabel 2.3 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Tahun 2024.....28

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat dengan Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebuah dokumen resmi menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, serta digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Walikota Bontang dalam Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah.

Mengingat pentingnya Rencana Kerja BAPENDA di dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka penyusunan dokumen tersebut dijadikan dasar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BAPENDA Kota Bontang tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disusun berlandaskan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38396) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kota Bontang;

- 10) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2024 yang dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2024
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
3. Merumuskan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu di Tahun 2022 (n-2) dan perkiraan capaian di tahun berjalan di tahun 2023 (n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan Rencana Strategis Bapenda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapenda di tahun-tahun sebelumnya. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan renja Bapenda di tahun lalu, menjelaskan realisasi program/kegiatan yang tidak, telah terpenuhi dan melebihi pencapaian target serta menjelaskan faktor-faktor juga kebijakan/Tindakan penyebabnya serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai tingkat capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaahaan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bapenda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bapenda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan dilakukan penyesuaian berdasarkan KEPMENDAGRI nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA

BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Dalam rangka penyusunan renja tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, dan perkiraan capaian di tahun 2024, serta capaian renstra Bapenda Kota Bontang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Bapenda di tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada Tahun Anggaran berjalan yaitu di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya mempunyai 2 program yaitu Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan pendapatan daerah, dengan 8 kegiatan diantaranya yaitu

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan
8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan berdasarkan capaian renstra (2021 sd 2026) yaitu sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021, 2022 dan target di tahun 2023 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa tujuh kegiatan dalam pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen.
2. Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja persentase capaian pendapatan asli daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2021, 2022 dan target di tahun 2023 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa satu kegiatan dalam pencapaian pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen. Capaian nilai pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2021	207.889.217.673	245.901.872.798,38	118
2022	201.375.311.000	231.330.413.304,58	115
2023	208.004.226.000		

3. Pada tingkat capaian realisasi target renstra di tahun 2026 dengan tiga puluh tiga sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah di tahun

2021, 2022 dan target di tahun 2023, mempunyai nilai persentase yang sangat fluktuatif dimana pada sub kegiatan yang bersifat rutin rata-rata mencapai diatas 50 persen, sedangkan pada sub kegiatan teknis rata-rata pencapaiannya dengan range sebesar 20% sd 80%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63%	>50%	Telah memenuhi target, kegiatan bersifat rutin
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60%	>50%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60%	>50%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60%	>50%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60%	>50%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60%	>50%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60%	>50%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	52%	>50%	Pelaksanaan pengadaan pakaian pada tahun 2021, tahun 2022 tdk diadakan dan diadakan kembali di tahun 2023
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	60%	>50%	Telah memenuhi target, kegiatan bersifat rutin
Penyediaan Komponen Instalasi	60%	>50%	

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51%	>50%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90%	>50%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80%	>50%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	40%		Dilaksanakan sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	48%		
Pengadaan Mebel	36%		
Penyediaan Jasa Surat menyurat	60%	>50%	Telah memenuhi target, kegiatan bersifat rutin
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	60%	>50%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56%	>50%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	60%	>50%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60%	>50%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	60%	>50%	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20%		Sub kegiatan dilaksanakan mulai tahun 2024
Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	60%	>50%	Telah memenuhi target, kegiatan bersifat teknis
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	60%	>50%	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	77%	>50%	Telah memenuhi target, kegiatan bersifat teknis
Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	53%	>50%	
Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan	27%		Dilaksanakan pemutakhiran

Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)			data secara berkala
Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	47%		Pelaksanaan pelayanan pada 11 pajak daerah secara berkala
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	60%	>50%	Telah memenuhi target, kegiatan bersifat teknis
Penagihan Pajak Daerah	60%	>50%	
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	80%	>50%	
Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	33%		Pelaksanaan sub kegiatan baru di tahun 2023

5. Implikasi serta kebijakan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab target kinerja yang direncanakan tidak tercapai adalah sebagai berikut :

- Pada sub kegiatan teknis beberapa target yang belum terpenuhi hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait kebijakan pendapatan, diantaranya Pajak penerangan jalan untuk industry ditiadakan dari Mahkamah Konstitusi di tahun 2021 sd 2023. Sehingga kebijakannya adalah melakukan percepatan kajian terkait kebijakan regulasi baru.
- Dilaksanakan pemutakhiran data secara berkala pada tiga kecamatan untuk PBB P2 dan BPHTB agar mendapatkan data pada data based yang valid.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan.
- Melaksanakan review Rencana Strategis perangkat Daerah jika terdapat regulasi yang harus disesuaikan.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Bapenda Kota Bontang disajikan pada tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah sd Tahun 2023 Kota Bontang

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1							2	3		4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%
x	xx	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	dokume n	4	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	150%	3	dokumen	10	dokumen	63%
x	xx	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5	dokume n	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60%
x	xx	01	2	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5	dokume n	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60%
x	xx	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7	8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9		11 = 10/4 x 100%	
x	xx	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	orang/ bulan	42	orang/ bulan	40	orang/ bulan	42	orang/ bulan	105%	41	orang/ bulan	125	orang/ bulan	60%
x	xx	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	laporan	60%
x	xx	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokume n	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
x	xx	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	475	paket	0	paket	0	paket	0	paket	0%	245	paket	245	paket	52%
x	xx	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210	orang	42	orang	5	orang	42	orang	840%	42	orang	126	orang	60%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7	8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%		
x	xx	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	3	paket	60%
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	paket	9	paket	2	paket	4	paket	200%	10	paket	23	paket	51%
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	paket	3	paket	2	paket	3	paket	150%	3	paket	9	paket	90%
x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	paket	2	paket	2	paket	4	paket	200%	2	paket	8	paket	80%
x	xx	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	dokume n	-	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	2	dokumen	40%
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050	laporan	210	laporan	44	laporan	88	laporan	200%	210	laporan	508	laporan	48%
x	xx	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	unit	20	unit	5	unit	3	unit	60%	31	unit	54	unit	36%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7	8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%		
x	xx	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	laporan	60%
x	xx	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	180	laporan	36	laporan	36	laporan	36	laporan	100%	36	laporan	108	laporan	60%
x	xx	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	265	laporan	53	laporan	48	laporan	48	laporan	100%	48	laporan	149	laporan	56%
x	xx	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165	unit	33	unit	33	unit	33	unit	100%	33	unit	99	unit	60%
x	xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	unit	25	unit	25	unit	25	unit	100%	25	unit	75	unit	60%
x	xx	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	unit	60%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1						2	3	4		5		6		7	8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%		
x	xx	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	300	persen	100%
x	xx	04	2	01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	300	persen	100%
x	xx	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	dokume n	-	dokumen	0%	dokumen	0%	dokumen	0%	1	dokumen	1	dokumen	20%
x	xx	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	30	dokume n	6	dokumen	3	dokumen	6	dokumen	200%	6	dokumen	18	dokumen	60%
x	xx	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20	laporan	4	laporan	2	laporan	4	laporan	200%	4	laporan	12	laporan	60%
x	xx	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50	unit	3	unit	2	unit	2	unit	100%	8	unit	13	unit	26%
x	xx	04	2	01	06	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	laporan	3	laporan	1	laporan	2	laporan	200%	3	laporan	8	laporan	53%
x	xx	04	2	01	07	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	186.000	Objek Pajak	37.200	Objek Pajak	2.000	Objek Pajak	4.000	Objek Pajak	200%	8.800	Objek Pajak	50.000	Objek Pajak	27%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9		11 = 10/4 x 100%	
x	xx	04	2	01	09	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	55	Layanan	11	Layanan	2	Layanan	4	Layanan	200%	11	Layanan	26	Layanan	47%	
x	xx	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10	dokume n	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	6	dokumen	60%	
x	xx	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	dokume n	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60%	
x	xx	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	dokume n	1	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	200%	1	dokumen	4	dokumen	80%	
x	xx	04	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0%	1	laporan	1	laporan	33%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan. Dasar pembentukan pelaksanaan adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bontang No. 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Pada Bab VI Pasal 12 Ayat 2 Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan Bapenda dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai Penyusun kebijakan teknis fungsi, pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Secara tupoksi dan struktural birokrasi dalam sistem pemerintahan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berkorelasi dengan tupoksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan. Dalam menetapkan programnya, Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada program yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Korelasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi Bapenda sebagai koordinator bidang pendapatan daerah.

Pada pelayanan Bapenda dengan indikator Kategori Kapasitas Fiskal dengan rumusan dari Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, indikator kinerja utamanya yaitu :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra, disajikan pada tabel, 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1.	Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	-	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,23%	3,29%	3,29%	3,53%	-5.93%	-14,5%	3,29%	3,53%	Persentase peningkatan PAD Yaitu nilai pertumbuhan Tahun ke n-(n-1)/(n-1)*100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	81	82	87	0	81	82	Nilai IKM dari penilaian survey dari Pemerintah Kota Bontang terhadap Pelayanan Bapenda

Berdasarkan tabel diatas bahwa target persentase PAD dan IKM dari tahun ke tahun meningkat, hal ini dalam perencanaan proyeksi target PAD meningkat, untuk realisasi di tahun 2022 bernilai (-) hal ini disebabkan Persentase peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun berkenaan dipengaruhi oleh realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Pada Tahun 2021 realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan tahun 2022, hal ini disebabkan pasca covid 19 dimana di Kota Bontang masih melakukan penataan kembali perekonomian dan adanya peralihan kebijakan aturan baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2023 dengan realisasi (-) dikarenakan perhitungan nilai realisasi pendapatan sampai bulan April di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 215.721.973.057,00 dari target di tahun 2023 sebesar Rp. 68.830.937.581,64 sehingga persentase pertumbuhan sebesar 31,91%.

Sedangkan nilai IKM ada peningkatan nilai satuan pada tahun 2022, untuk nilai 2023 belum bisa ternilai hal ini dikarenakan belum ada penilaian dari surveyor Pemerintah Kota Bontang.

Untuk proyeksi di tahun 2024 dan 2025 direncanakan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini kinerja terhadap peningkatan pelayanan di Bapenda selalu diprioritaskan dalam pemenuhan peningkatan PAD di Kota Bontang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan suatu program dan sasaran. Badan Pendapatan Daerah sesuai renstra yang dibuat telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu ‘Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah’, dengan dua indikator kinerja yaitu ‘Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah’ dan ‘Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)’ yang telah direalisasikan dalam 2 program dan 8 kegiatan pada tahun 2021 sd 2026, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan 7 kegiatan, sedangkan program pengelolaan pendapatan daerah didukung dengan 1 kegiatan.

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan pada tabel sebelumnya bahwa indikator pertama yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	-5,93%	3,96	>100

Target akhir renstra di tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan realisasi di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan diatas 100%, hal ini diharapkan pencapaian realisasi dari target di tahun 2026 lebih besar yaitu dengan target PAD Rp. 231.239.680.800,- dibandingkan dengan target di tahun 2022 sebesar RP. 201.375.311.000,-. Sedangkan pada indikator kedua yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	83	>100

Indikator Kinerja berdasarkan target akhir renstra sebesar 83, dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 persentase capaiannya diatas 100%, diharapkan dari tahun ke tahun realisasi IKM melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Penurunan realisasi PAD di tahun 2022 disebabkan :

- a) Adanya perubahan regulasi terkait kebijakan pendapatan , diantaranya Pajak penerangan jalan untuk industry ditiadakan dari Mahkamah Konstitusi.
- b) IMB perubahan regulasi menjadi PBG menurun karena semakin rumit terkait gambar.
- c) Pelayanan Pelabuhan sebelumnya dinaungi oleh Pelindo dialihkan ke Perusda.
- d) Masih banyak piutang pajak yang belum tertagihkan
- e) Belum optimalnya Sistem penginputan pajak yang belum terintegrasi.

Sedangkan Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran IKM tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor :

- a) Komitmen yang kuat dari segenap sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada Masyarakat.
- c) Melakukan Inovasi pelayanan publik kepada masyarakat.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pada indikator dalam peningkatan PAD, alternatif yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan percepatan kajian terkait kebijakan regulasi terbaru.
- b) Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak daerah serta melakukan jemput bola ke masyarakat atau wajib pajak
- c) Melakukan peningkatan sosialisasi melalui media elektronik maupun masyarakat terkait perpajakan
- d) Dilaksanakan pemutakhiran data wajib pajak.
- e) Membuat inovasi untuk peningkatan potensi pendapatan

Sedangkan tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan sistem yang terintegrasi dan peningkatan inovasi untuk memudahkan memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat tentang pajak.
- b) Peningkatan sosialisasi di media untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada Masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi dan Catatan strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang direncanakan.

Langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a) Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
- c) Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d) Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
- e) Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
- f) Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.
- g) Melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak untuk PBB-P2 dan pajak daerah lainnya.
- h) Melaksanakan dan merealisasikan penghapusan piutang pajak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

- i) Membuat inovasi dalam pengembangan sistem pelayanan pajak daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2024 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

29

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Tabel 2.3											
REVIEW RANCANGAN AWAL TERHADAP RKPd TAHUN 2024											
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG											
RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	14.848.121.187	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	17.817.465.063	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	28.374.897	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	28.127.746	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12.977.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12.879.062	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.712.527	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.708.447	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.922.647	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.827.710	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 Persen	11.437.858.959	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 Persen	13.328.817.972	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	11.364.806.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	13.255.868.758	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	68.091.059	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhit tahun SKPD	1 Laporan	68.086.711	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.961.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.862.503	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	146.404.850	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	213.108.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	99.190.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	46.404.850	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	113.918.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	100 persen	679.175.845	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	100 persen	1.420.798.108	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.749.865	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	118.419.462	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	69.792.426	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	351.832.797	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	52.053.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	52.052.984	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.450.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	437.880.119	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	878.293.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	23.992.083	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	23.362.957	
1	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 paket	23.992.083	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 paket	23.362.957	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	2.165.542.029	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	2.437.188.000	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	283.445.971	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	324.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.874.096.058	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.105.188.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	366.772.524	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	366.062.280	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	297.078.819	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	296.752.280	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	39.918.849	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	39.700.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	29.774.856	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	29.610.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	2.598.583.992	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	2.531.491.091	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	2.598.583.992	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	2.531.491.091	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	200.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	117.190.000	
2	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	273.740.116	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	266.946.000	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	170.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	53.630.000	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 unit	281.168.205	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 unit	49.063.440	
5	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	417.759.606	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	515.040.801	
6	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	18000 objek pajak	500.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	18000 objek pajak	901.410.000	
7	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	62.622.873	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	62.566.204	
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	11 Dokumen	382.758.032	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	11 Dokumen	256.360.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)		
9	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	32.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	66.832.646		
10	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	178.535.160	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	191.810.000		
11	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	50.642.000		
					17.446.705.179	TOTAL					20.348.956.154	

Berdasarkan tabel 2.3 review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan dua program, delapan kegiatan dan tiga puluh tiga kegiatan pada rancangan awal RKPD pagu indikatif sebesar Rp. 14.848.121.187,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), sedangkan kebutuhan dana sebesar Rp. 20.435.020.523,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Dengan rincian penambahan sebagai berikut :

- a. Pengembangan aplikasi perpajakan berbasis Geospasial.
- b. Pemetaan pendataan berupa validasi data di Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Barat.
- c. Optimalisasi PAD melalui sosialisasi/rapat koordinasi tentang penerimaan PAD
- d. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah berbasis IT.
- e. Mengurangi nilai tunggakan sesuai dengan target pengurangan tunggakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian, kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang memuat 7 (tujuh) Program Nasional meliputi :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkann ketahanan bencana, perubahan iklim;
- g. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi

salah satu instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bapenda Kota Bontang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah “Meningkatnya Kemandirian Fiskal di Daerah. Dengan indikator tujuannya, yaitu “Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan Program /kegiatan/ sub kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 berdasarkan kebutuhan dana sebesar Rp. 17.446.705.179,- (Tujuh belas milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan perkiraan maju rencana tahun 2025 sebesar Rp. 21.626.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan selisih Rp. 4.176.294.821,- (empat milyar serratus tujuh puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	100 persen	14.848.121.187,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	18.706.000.000,00
x	xx	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	Kota Bontang	100 persen	28.374.897,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	35.000.000,00
x	xx	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	3 dokumen	12.977.250	Dana Umum (APBD)		3 dokumen	15.000.000,00
x	xx	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Bontang	1 Dokumen	1.737.500	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	2.500.000,00
x	xx	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Bontang	1 Dokumen	1.737.500	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	2.500.000,00
x	xx	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	1 Laporan	11.922.647	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	15.000.000,00
x	xx	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	Kota Bontang	100 Persen	11.437.858.959,00	Dana Umum (APBD)		100 Persen	15.076.000.000,00
x	xx	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	42 Orang/Bul an	11.364.806.400	Dana Umum (APBD)		42 Orang/Bulan	15.000.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bontang	1 Laporan	68.091.059	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	70.000.000,00
x	xx	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	1 Dokumen	4.961.500	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	6.000.000,00
x	xx	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	Kota Bontang	100 persen	146.404.850,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	200.000.000,00
x	xx	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bontang	42 Paket	100.000.000			42 Paket	150.000.000,00
x	xx	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	9 Orang	46.404.850	Dana Umum (APBD)		9 Orang	50.000.000,00
x	xx	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	Kota Bontang	100 persen	679.175.845,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	782.000.000,00
x	xx	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	10 Paket	10.000.000	Dana Umum (APBD)		10 Paket	15.000.000,00
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	9 Paket	100.000.000	Dana Umum (APBD)		9 Paket	120.000.000,00
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	5 Paket	69.792.426	Dana Umum (APBD)		5 Paket	75.000.000,00
x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bontang	7 Paket	52.053.300	Dana Umum (APBD)		7 Paket	60.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bontang	12 Dokumen	9.450.000	Dana Umum (APBD)		12 Dokumen	12.000.000,00
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	57 Laporan	437.880.119	Dana Umum (APBD)		57 Laporan	500.000.000,00
x	xx	01	2	07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	Kota Bontang	100 persen	23.992.083,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	30.000.000,00
x	xx	01	2	07	05	Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Bontang	3 paket	23.992.083	Dana Umum (APBD)		3 paket	30.000.000,00
x	xx	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	Kota Bontang	100 persen	2.165.542.029,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	2.209.000.000,00
x	xx	01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	1 Laporan	8.000.000	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	9.000.000,00
x	xx	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Kota Bontang	12 Laporan	283.445.971	Dana Umum (APBD)		12 Laporan	300.000.000,00
x	xx	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	12 Laporan	1.874.096.058	Dana Umum (APBD)		12 Laporan	1.900.000.000,00
x	xx	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kota Bontang	100 persen	366.772.524,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	374.000.000,00
x	xx	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang	15 unit	297.078.819	Dana Umum (APBD)		15 unit	300.000.000,00
x	xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bontang	33 unit	39.918.849	Dana Umum (APBD)		33 unit	42.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang	5 Unit	29.774.856	Dana Umum (APBD)		5 Unit	32.000.000,00
x	xx	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Kota Bontang	100 persen	2.598.583.992,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	2.920.000.000,00
x	xx	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bontang	100 persen	2.598.583.992,00	Dana Umum (APBD)		100 persen	2.920.000.000,00
x	xx	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	1 dokumen	200.000.000	Dana Umum (APBD)		1 dokumen	250.000.000,00
x	xx	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	2 dokumen	273.740.116	Dana Umum (APBD)		2 dokumen	300.000.000,00
x	xx	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	2 Laporan	170.000.000	Dana Umum (APBD)		2 Laporan	200.000.000,00
x	xx	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	6 unit	281.168.205	Dana Umum (APBD)		6 unit	300.000.000,00
x	xx	04	2	01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang	2 Laporan	417.759.606	Dana Umum (APBD)		2 Laporan	450.000.000,00
x	xx	04	2	01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kota Bontang	18000 objek pajak	500.000.000	Dana Umum (APBD)		18000 objek pajak	550.000.000,00
x	xx	04	2	01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang	2 Layanan	62.622.873	Dana Umum (APBD)		2 Layanan	70.000.000,00

c						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kota Bontang	11 Dokumen	382.758.032	Dana Umum (APBD)		11 Dokumen	400.000.000,00
x	xx	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	32.000.000	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	50.000.000,00
x	xx	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	178.535.160	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	200.000.000,00
x	xx	04	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang	1 Laporan	100.000.000			1 Laporan	150.000.000,00
Total										17.446.705.179,00				21.626.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dimana tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian semoga dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah ini dapat menjadi acuan demi tercapainya tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Bontang, Juli 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah



RAFIDAH, SE., M.Si

NIP. 19700323 200112 2 003